

## DAFTAR BACAAN

- Affandi, Muhammad, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Ateng Sjafrudin, *Pengurusan Perijinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan St Aloysius, Bandung, tt.
- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ahmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- A.M. Donner Dalam Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian-pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1980.
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Andreas Albertus A P, *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta, 2010.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, 2006.

- Beni Surya, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran dan Penghapusan Fidusia Secara Online*, UNS, Surakarta, 2016.
- B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum, Rufe ol Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004.*
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Didik M Arif, dan Elystris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Administrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Dworkin, *Law as Interpretation, dalam Wacks, Raymond, Introduction to Philosophy of Law, Oxford: Oxford University Press, 2006.*
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menaangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ellise T. Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Fardani Azhar, *Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Pemberlakuan Sistem Fidusia Online Di Kota Semarang*, Unnes, Semarang, 2016.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberikan Jaminan (jilid II)* Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005.
- Gunardi Soeharto, *Menegakkan Kemandirian Yudisial*, Universitas Admajaya, Yogya-karta, 2006.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2011.

Grhansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Zifatama Publisher, Taman Sidoarjo, 2014.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Henry Cambell, *Black's Law Dictionary<sup>6th</sup>*, West Publishing, St.Paul, Mennesota, 1990.

Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Hary Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003.

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, ancient and Modern*, USA: West Publishing Company, 1991.

*International Commision Of Jurists Di Bangkok, The Dinamic Aspects Of The Rule Of Law In Modern Age (Aspek-aspek Dinamis Rule of Law di Abad Moderen)*, Februari 1965.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2011.

Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

-----, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012.

I.S. Susanto, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Ismail Sunny, *Mencari Keadilan, Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Ivone Dwiratna, 2 Mei 2013, *Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulag PNBP (online)*, 2 Mei 2013.

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1971.

J.P. Fitzgerald, *Salmon on Jurisprudence, Sweet and Maswel*, London, 1966. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, P.T. Tatanusa, Jakarta, Cet. I, 2005.

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1971.

- Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- K.P.H.A.Tjandra Sridjadja Prajdjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Linda Smith dan William Raeper, *Ide-ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, Penerjemah P. Hardono Hadi, Kanisius, Jakarta, 2000.
- Latumenten Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*, Bandung : Erresco, 2010.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 82.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan*, Bandung: Media Ilmu, 2012.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se- Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996.
- M. Bahsan, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 2005.
- Montesquieu, *The Spirit of Law*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang pembiayaan Cetakan IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Mathias Klatt, Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation*, (Oxford and Portland Nurhasan Ismail, Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung : Mandar Maju, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan (Dasar Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, 1998..
- Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila, UUD 45, dan Mekanisme Pelaksanaanya*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Mukti Fajar NO dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Untag Press, 2010.
- Mukti Arto, Dalam Soetanto Soepiadhy, *Perubahan Undang Undang Dasar 1945 Dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2006.
- Moris L. Cohen, ec.all., *Legal Reseach in a Nut Shell*, West Publishing, Co., St. Paul, Minn, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administatief Recht*, A. Jongblood & Zoon, Scraven- hage, 1950.
- Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, *Perlindungan Hukum BagiKreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang dubebani FidusiaUlang oleh Debitur yang Sama*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan (Licensing Handling)*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991.

- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- N.M. Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, Penyunting Philipus M.Hadjon, Utrecht, 1991.
- Nico Adrianto dan Ludy Prima Johansyah, *Korupsi di Daerah, Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cet.9, Jakarta, 1998,.
- , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cet.9, Jakarta, 1998, h. 76.
- Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya, 1988.
- , *et.al.*, *Pengantar Hukum Administasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.,7.
- , *Tindak-tindak Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa penerbit, tanpa tahun.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Diktat Pelajaran Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

- Ponco Retno Andayani, Kepala bagian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM, 2012.
- Patton dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Kurnika Universitas Terbuka Jakarta, 1988.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1978.
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996,.
- S. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, “*Teori dan Metode Dalam Sosiologi Hukum*”, Makalah Dalam Pertemuan Ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 11-12 November 1984.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Sir Rupert Cross, *Precedent in English Law*, Editor J.W. Harris, Published, England, 1991.



- Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Soetanto Soepiady, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.
- S. Soekanto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- Soetanto Soepiady, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.
- Sri Soemantri, *Perlindungan Hukum Melalui Perlindungan Hak Asasi*, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH-Unair, Surabaya, 1992.
- Sri Mulyani, *Makna Sumpah Dalam Pidato Pengambilan Sumpah Pejabat Di Lingkungan Departemen Keuangan*, Akses Tanggal 20 Juli 2020.
- Sri Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah Seminar 50 Tahun kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UGM Yogyakarta, 26 Agustus 1995.
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Sadli Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Sjachran Basah Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Presss, Cet. Kedua, Yogyakarta, 2003.
- Tan Thong Kie, *Serba-serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia*, tidak dipublikasikan, 1984.
- , *Serba-serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia*, tidak dipublikasikan, 1984.
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Teguh Samodra, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

W. Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and son Limited, London, 1960.

Yovita A. Mangesti dan Slamet Suhartono, *Ilmu Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD NRI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie* *Staatsblad* 1915 Nomor 732 tentang *Wetboek Van Strafrecht*).

Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Kedelapanatas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005  
Tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik  
Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan  
Keenamatas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit  
Organisasi, dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

*Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb./ 3425/86

**Website:**

<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2d24813311c42cbc631f/proses-pemeriksaan--pidana-di-indonesia>, page.All.

<https://icjr.or.id/peraturan-kapolri-no-8-tahun-2009-tentang-implementasi-prinsip-dan-standar-hak-asasi-manusia-dalam-penyelenggaraan-tugas-kepolisian-negara-republik-indonesia/>

<http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12.penegakan.hukum.html>, 12 Maret 2020.